



Ombudsman: Optimalkan Peran Satgas Covid-19

BANDARLAMPUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung akan menindak tegas pelanggar protokol kesehatan (Prokes) di delapan kabupaten/kota. Delapan kabupaten/kota tersebut yakni Kota Bandarlampung, Lampung Barat, Lampung Timur, Lampung Utara, Lampung Selatan, Tanggamus, Metro dan Pringsewu.

Kesra Qodratul Ikhwan, mengatakan berdasarkan hasil rapat telah disepakati bahwa penindakan pelanggar protokol kesehatan akan dimulai secara lebih efektif karena sebagai penegasan Peraturan Daerah tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Nomor 3 Tahun 2020.

penindakannya dan untuk sementara ini fokus utama kita ke penindakan pelanggar prokes di delapan kabupaten/kota yang berzona merah," katanya, Rabu (20/1). Ia melanjutkan untuk tindak tegas atau sanksi yang diberikan nanti sesuai dengan Perda AKB yakni sanksi bagi perseorangan berupa teguran, kerja sosial, daya paksa

Baca. | PELANGGAR | Hal. 7

MINIMALISIR DAMPAK BENCANA

Bandarlampung dapat Project CRIC

Hanya 10 Kota se-Indonesia

BANDARLAMPUNG - Kota Bandarlampung menjadi salah satu dari 10 kota di Indonesia yang terpilih sebagai kota yang melaksanakan Project Climate Resilience and Inclusive Cities (CRIC) Kota Berketahanan Iklim yang Inklusif dari tahun 2020-2024.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandarlampung Khaidarmansyah mengatakan, dari seluruh Indonesia, hanya 10 kota yang terpilih mendapatkan project ini, salah satunya Kota Bandarlampung.

Baca. | BANDARLAMPUNG | Hal. 7

JADWAL SHOLAT HARI INI					
Tanggal	Imsyak	Shubuh	Terbit	Dhuha	
21	04:27	04:37	05:56	06:20	
	Dzuhur	Ashr	Maghrib	Isya	
	12:12	15:36	18:24	19:38	



Rapat dengan Tim POKJA Kota Bandarlampung dan CRIC di kantor Inspektorat setempat, Rabu (20/1).

FOTO DEKA AGUSTINA/LAMPUNG NEWSPAPER



FOTO DEKA AGUSTINA/LAMPUNG NEWSPAPER

341 CPNS Bandarlampung Terima SK

BANDARLAMPUNG - Walikota Bandarlampung Herman HN meminta pegawai negeri Sipil (PNS) untuk kerja dengan baik sesuai peraturan undang-undang dan melayani

Baca. | 341 CPNS | Hal. 7



JURNALISME WARGA

Lampung Newspaper mengajak warga Lampung berpartisipasi dalam mengawasi pembangunan. Sampaikan tulisan, kritik dan saran untuk pembangunan di Provinsi Lampung. Kami juga menerima foto, berita dan video peristiwa atau kejadian. Silahkan kirim ke WhatsApp 082136204136.

Penambangan Bukit Campangraya Diduga Ilegal

Warga Keluhkan Kerusakan Lingkungan

BANDARLAMPUNG – Penambangan yang terjadi di Bukit Campangraya, Sukabumi Kota Bandarlampung yang secara masif hanya dikelola oleh perorangan. Dari hasil penelusuran, kegiatan ini diduga dilakukan

secara ilegal alias tak mengantongi izin penambangan galian C.

Dari hasil pemantauan di salah satu lokasi penambangan, pengerukan dilakukan menggunakan alat berat. Sebanyak tujuh excavator menggerus batu dan tanah di bukit tersebut. Lalu, sejumlah truk engkel langsung membawa hasil galian itu melalui Jalan

Alimudin Umar.

Akibat aktivitas penambangan yang dilakukan sejak 2018 itu, kerusakan jalan tak bisa elak. Bahkan, warga mulai gerah dengan adanya aktivitas penambangan yang dinilai tak memberikan dampak positif bagi warga setempat. Debu kemana-mana dan material yang diangkut ruk sesekali

tergelincir ke jalan.

Menurut keterangan warga Campangraya yang enggan disebut namanya, pengelola tambang di bukit tersebut dikelola secara perorangan oleh tiga orang: Haji Toha, Endel dan Haji Feri. Akibat kerusakan itu, warga

Baca. | PENAMBANGAN | Hal. 7



Kondisi jalan yang mengalami kerusakan akibat muatan galian C Bukit Campangraya, Rabu (20/1).

FOTO HARI ANDREAS AJAHAR/LAMPUNG NEWSPAPER



Hybrid Box (STB) Tambahan & PLC

Harga Khusus 60.000

Hubungi 0822-6946-2147



Bank Lampung kredit usaha mikro KUM berjaya

plafond 5jt - 20jt

GRATIS ASURANSI

Pola Kamitran

Bank Lampung Kredit Usaha Rakyat

Dapatkan Kredit dengan persyaratan mudah, cepat dan bunga ringan

LIBATKAN PUSAT RISET PERKERETAAPIAN

ITERA Kaji Keamanan Jembatan Kereta Api di Indonesia

KOMITE Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) melibatkan Pusat Riset dan Inovasi (Purino) Perkeretaapian Institut Teknologi Sumatera (ITERA) dalam mengkaji keamanan jembatan kereta api di Indonesia. Hal tersebut menindaklanjuti runtuhnya jembatan kereta api di Sungai Glagah, Brebes, Jawa Tengah yang terjadi pada Senin, (11/1) lalu.

ITERA dilibatkan karena sejak 2019, tim Pusat Riset dan Inovasi Perkeretaapian ITERA bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan PT KAI Divre 4 Tanjungkarang, telah melakukan penelitian dan pengembangan pengelolaan sistem monitoring jembatan keret api melalui structural health monitoring system (SHMS). Penelitian tersebut dilakukan pada jembatan kereta api BH 77 di Tegineneng, lintas Tanjungkarang-Martapura, Lampung. Program riset tersebut juga menjadi program riset prioritas kerjasama BPPT - ITERA.

Kepala Pusat Riset dan Inovasi Perkeretaapian ITERA, Ir. Sony Julison, M.Sc., Ph.D., IPU, menyampaikan musibah robohnya jembatan kereta api di Brebes tersebut memicu diskusi antara tim BPPT dan ITERA yang selama ini melakukan penelitian tentang monitoring kondisi prasarana jembatan kereta api melalui metode SHMS. Penelitian tersebut dinilai relevan dengan kondisi jembatan-jembatan kereta api di Indonesia, sehingga KNKT mengundang ITERA dan beberapa ahli di bidang transportasi kereta api untuk mengkaji keamanan jembatan secara nasional.

“Purino KA ITERA bersama BPPT telah menggalang kerja sama yang lebih luas lagi dengan KNKT dan KAI tentang SHMS. Dalam waktu dekat kami akan diskusi lebih lanjut dengan KNKT untuk menentukan sejumlah jembatan kereta api lain yang akan dijadikan objek penelitian dan implementasi SHMS,” ujar Julison, Rabu (20/1).

Untuk tahap awal, Kepala Purino Perkeretaapian ITERA, dan dosen tim peneliti di Purino Perkeretaapian ITERA, M. Abi Berkah Nadi, S.T., M.T., dan Nurmagitia Pamursari, S.T., M.T. dilibatkan dalam rapat koordinasi membahas kasus robohnya jembatan Kereta Api BH 1120 yang dikoordinator oleh KNKT. Dalam diskusi tersebut tim ITERA dimintai memberikan saran dan masukan dalam kajian keamanan jembatan di Indonesia, mengingat sudah berumurnya jembatan kereta di beberapa lokasi di Indonesia.

“Keruntuhan Jembatan di Indonesia banyak terjadi akibat adanya miss calculate pada debit banjir melebihi dari rencana dimana struktur pilar tidak dapat menahan beban air yang datang, selain itu kekuatan struktur pilar yang tidak lagi bisa menerima beban serta kurangnya pemeliharaan juga menjadi penyebab,” ujar salah satu dosen peneliti Purino Perkeretaapian ITERA, M. Abi Berkah.

Dalam forum tersebut Tim Purino Perkeretaapian ITERA kembali memaparkan model pemeliharaan dan pemeriksaan rutin jembatan kereta api menggunakan Structural Health Monitoring System (SHMS). Dengan sistem monitoring ini,

dapat dilihat kondisi jembatan kereta api melalui signal sensor yang akan membantu melihat beberapa komponen mulai dari strain, deflection, dan displacement; serta analisa numeric.

“Penelitian jembatan kereta BH 77 Tegineneng Lampung, yang kami lakukan diharapkan dapat menjadi dasar perhitungan SHMS jembatan kereta api di Indonesia, agar kedepannya tidak ada lagi jembatan kereta api yang akan runtuh kegagalan struktur,” ujar M. Abi Berkah.

Sejak awal, Purino Perkeretaapian ITERA telah melibatkan kelompok keahlian lain di ITERA untuk turut serta dalam penelitian berbagai aspek kesehatan (keteguhan) struktur jembatan BH 77 tersebut. Misalnya telah dilakukan penelitian pengukuran frekuensi alami dan pergerakan tanah di sekitar pangkal jembatan bersama rekan-rekan dari Geofisika ITERA. Juga telah dibuat model (mock-up) jembatan BH 77 untuk peragaan dalam diskusi serta penentuan tempat pemasangan sensor.

Selain memiliki pusat riset dan inovasi perkeretaapian, ITERA juga telah membuka program studi Teknik Perkeretaapian, yang telah menerima mahasiswa angkatan pertamanya pada tahun 2020. Selama ini dukungan penuh pimpinan untuk riset tentang perkeretaapian juga selalu diberikan, melalui LP3 dan berbagai kelompok keahlian lain di ITERA. Purino Perkeretaapian ITERA juga telah bermitra erat dengan beberapa instansi seperti BPPT dan Kementerian Perhubungan, BUMN, PT KAI, PT LEN, dan PT INKA. (rls/apr)

Herman HN Silahkan Living Plaza Berdiri

WALHI: TAK SESUAI TATA RUANG

BANDARLAMPUNG - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Eksekutif Daerah Lampung menolak rencana pembangunan Pusat Perbelanjaan Living Plaza Lampung, yang akan dibangun di Kelurahan Rajabasa Nunyai, Kecamatan Rajabasa, Bandarlampung, meski izin Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) telah dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat.

Hal itu lantaran WALHI menilai perencanaan pembangunan pusat perbelanjaan itu tidak sesuai dengan tata kelola kota. “Kita tetap akan menolak meski AMDAL itu sudah dikeluarkan,” ujar Direktur Eksekutif Walhi, Irfan Tri Mursi, saat ditemui di Sekretariat WALHI Lampung, Rabu (20/1).

Selain tidak sesuai dengan tata ruang, kata dia, lokasi rencana aktivitas atau kegiatan berada di wilayah yang selama ini menjadi daerah resapan air, dan kawasan rawan bencana banjir yang mana bencana

banjir terjadi setiap tahun di wilayah tersebut.

“Pertama, disitu kan memang lahan rawan banjir. Jadi kalau lahan datar dihadirkan konstruksi, air yang ada akan naik hingga ke pemukiman warga,” lanjutnya.

Menurutnya, lahan daerah kawasan resapan air tersebut kurang lebih 2,7 Hektar. Dimana Living Plaza itu rencananya akan dibangun oleh PT Tiga Dua Delapan. Kemudian, terangnya, walaupun pihak pengembang akan menjanjikan dibangunnya gorong-gorong untuk aliran air. Apakah hal itu bisa, lantaran itu jalan provinsi. “Walaupun di daerah itu dibangun gorong-gorong, banjirnya akan pindah ke tempat lain. Karena pembangunan mall di ruang daerah pendidikan juga dirasa tidak pas,” pungkasnya.

Sementara itu, hal berbeda disampaikan Walikota Bandarlampung Herman HN saat ditemui di depan gedung Semergou, kantor pemkot setempat, Rabu (20/1). “Ya jika

sudah sesuai dengan aturan silakan dibangun, izin kita permudah, tetapi sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata dia.

Menurut orang nomor satu di Kota Tapis Berseri ini, mempermudah perizinan dilakukan agar ekonomi cepat pulih dan dapat menyerap pengangguran di Lampung, khususnya Kota Bandarlampung. “Agar ekonomi kita pulih artinya dia bangun baru, dia akan menerima tenaga kerja yang penting KTP dari Lampung. Sudah saya ingatkan,” ujarnya.

Herman HN menambahkan, siapapun yang ingin berinvestasi di Bandarlampung akan diberikan izin, selama dirinya masih menjabat walikota. Namun, tentunya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Segeralah siapa yang mau investasi ke Bandarlampung akan, tapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya ingin pengangguran ini bisa kerja semua,” tegasnya. (dka/apr)



DANA PROYEK BELUM CAIR

Smep Belum Selesai, Pekerja Diliburkan

BANDARLAMPUNG - Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bandarlampung menyatakan pembangunan gedung Pasar Smep telah selesai dan tinggal menjalani pemeliharaan yang berlangsung sekitar enam bulan ke depan. Namun, pembangunan gedung yang sempat mangkrak sejak ide pembangunan pasar modern muncul pada 2013 silam dan dilanjutkan kembali pada anggaran tahun 2019 sampai 2020 itu, tampak sepi aktivitas.

Berdasarkan informasi yang diterima dari sejumlah pekerja yang masih menetap di lokasi, sebagian pekerja memilih pulang lantaran gaji yang tidak dibayarkan. Sementara itu,

Walikota Bandarlampung Herman HN mengatakan, bahwa pembangunan pasar tersebut belum selesai dan ia akan meninjau lokasi proyek senilai kurang lebih Rp45 miliar ini.

Pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas perdagangan kota setempat untuk melakukan penataan Pasar Smep agar lebih tertata. “Ya belum, nanti saya koordinasi dengan dinas perdagangan. Kalau itu semua sudah masuk, nanti itu diancurin jalan semua harus dibagusin,” kata Herman HN saat diwawancarai di depan gedung Semergou, kantor pemkot setempat, Rabu (20/1).

Nantinya, kata dia, pasar

itu akan menyediakan ruang sebanyak 600-700 kios. “Termasuk area parkir dan basement. Dalam desain sendiri bangunan Pasar Smep memiliki luas 63 x 56 meter,” terangnya.

Sementara itu ketika dikonfirmasi, Pengawas Konstruksi PT Asmi Hidayat Muhammad Zen, selaku pemenang tender pembangunan Pasar Smep mengakui adanya keterlambatan pembayaran gaji kepada para pekerja proyek. “Makanya para pekerja diliburkan sementara waktu,” kata dia.

Menurutnya, keterlambatan pencairan itu dipicu Pemkot Bandarlampung belum mencairkan dana proyek, kepada

rekanan atau pihak ketiga yang menangani pembangunan pasar tersebut. “Dari pemkot belum ada pencairan. Ya kita gimana lah. Kita mau ngutang juga belum bisa menyelesaikan administrasi pembayaran tukang, karena mau beli material juga,” katanya.

Dia mengaku, guna mengatasi hal itu, rekanan terpaksa mencari dana talangan untuk membayar tunggakan gaji para pekerja konstruksi agar pembangunan dapat kembali berjalan. “Kita upayakan meminjam atau mencari talangan dari mana saja yang penting bisa jalan lagi. Insyaallah minggu depan sudah mulai jalan lagi,” pungkasnya. (dka/apr)

UMROH & HAJI

PATUNA

TERPERCAYA SEJAK 1983

UMROH Mulai 30 Juta (+)

HAJI PLUS Mulai 126 Juta (+)

Tour BALI Mulai 4 Juta (+)

Tour TURKEY Mulai 12 Juta (+)

Tour MESIR Mulai 27 Juta (+)

PATUNA TOUR & TRAVEL
Jl. Kartini No 2 (SPBU Pertamina)
Tanjung Karang B. Lampung

0721 262 822
0813 4041 2710

Patuna Bdi Patuna_tourtravellampung @Patuna_Lpg

TEGAL MAS ISLAND

PUNCAK MAS, BUKIT MAS dan TEGAL MAS

Buka Dengan Koridor dan Protokol Kesehatan Kawasan Wajib Menggunakan Masker

TAHAPAN NEW NORMAL YANG DISIAPKAN PEMERINTAH

FASE 1 (1 Juni 2020)

- Seluruh area yang dapat dikunjungi dengan protokol kesehatan Covid-19
- Masker wajib dipakai bagi pengunjung, karyawan, dan staf
- Berkeseluruhan tidak ada orang yang masuk

FASE 2 (8 Juni 2020)

- Tidak ada orang yang dapat dikunjungi tanpa protokol kesehatan
- Tidak ada orang yang dapat dikunjungi tanpa protokol kesehatan
- Tidak ada orang yang dapat dikunjungi tanpa protokol kesehatan

FASE 3 (16 Juni 2020)

- Masker wajib dipakai bagi pengunjung, karyawan, dan staf
- Berkeseluruhan tidak ada orang yang masuk
- Berkeseluruhan tidak ada orang yang masuk

FASE 4 (6 Juli 2020)

- Berkeseluruhan tidak ada orang yang masuk
- Berkeseluruhan tidak ada orang yang masuk
- Berkeseluruhan tidak ada orang yang masuk

FASE 5 (20-27 Juli 2020)

- Berkeseluruhan tidak ada orang yang masuk
- Berkeseluruhan tidak ada orang yang masuk
- Berkeseluruhan tidak ada orang yang masuk

Data Update Sampai E-Voting Pilkada dengan SID

LAMSEL- Kemudahan pencatatan kependudukan dan pelayanan administrasi masyarakat di desa menjadi tantangan tersendiri untuk para penggiat digitalisasi di Indonesia. Sistem Informasi Desa atau SID ala David Kurniawan mulai menjawab tantangan tersebut untuk memudahkan aparatur dan masyarakat desa.

Dengan sistem yang terintegrasi internet digital tersebut. Masyarakat dituntun untuk semakin cerdas dan memanfaatkan teknologi dalam mendapatkan Pelayanan kependudukan.

“Jadi warga datang masuk ke sistem dan menempelkan KTP ke mesin maka seluruh data sudah bisa ditampilkan,” kata David Kurniawan saat menjelaskan cara kerja sistem informasi itu.

Davit Kurniawan yang seorang “Hacktivist” dengan spesifikasi keahlian Digital Forensic & Hacking tersebut juga yang sangat konsen menghabiskan waktunya melakukan riset dan berbagai aktifitas sosial di pelosok desa di daerah jawa dan sumatera sejak 2016. Sampai saat ini bersama dengan Perkumpulan Desa Digital Terbuka telah membagikan SID secara gratis dan mengintegrasikan 11 Ribu Desa Digital secara online di seluruh Indonesia.

“Giat kami hari ini di Desa Cinta Mulya Lampung

Selatan, kami membuat sebuah fitur layanan administrasi kombinasi dengan beberapa peralatan yg dapat membaca Data Nomor Kartu dan Scan eKTP. Dengan fitur ini seluruh warga di seluruh Desa/Kelurahan dapat melakukan berbagai layanan administrasi secara mandiri seperti surat ijin keramaian, surat keterangan tidak mampu, surat pengantar nikah dan lain sebagainya hingga mengecek bantuan sosial,” beber David.

Sistem Informasi Desa yang didalamnya memuat berbagai kebutuhan Data di Desa seperti Data Penduduk, Data Anak Sekolah, Data Lanjut Usia, Data Pekerjaan, Data Aset Desa, Data Pembangunan dan lainnya. Semua terangkum dalam sistem tersebut dan berbasis GIS, yang dapat mengecek lokasi kordinat berdasar NIK, Alamat, Photo Rumah, Photo Lokasi dan Koordinat Pembangunan Desa dari 0% hingga 100%, Data Stunting, Data UMKM dan masih banyak lagi hingga kesiapan E-Voting pemilihan Kades (pilkades).

“Ini telah kami implementasikan di Desa Hanura Pesawaran, Desa Srihawono Lamtim, Desa Cinta Mulya Lamsel, Desa Podomoro Pringsewu. Semoga ini bermanfaat bagi semua warga desa dimanapun,” tandas David Kurniawan. (**rdo/apr**)



David Kurniawan
Hacktivist

Pembobol Warung Diringkus Polsek Penengahan

LAMSEL - Dibantu warga setempat, pelaku pembobol warung sembako, di Desa Sumur, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan, berhasil diringkus Tim Reskrim Polsek Penengahan.

Berdasarkan informasi, pelaku bernama Hengki Luis (33) warga Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, sebelumnya berhasil membobol warung sembako milik Rofiq Ikhwan (32) yang berada di Dusun Harapan, Desa Sumur, sekitar pukul 03.00 WIB, pada Selasa (19/1).

Saat melakukan aksinya, pelaku terlebih dahulu merusak kunci gembok pintu warung hingga terbuka. Kemudian, pelaku masuk kedalam dan mengambil sejumlah barang dagangan milik korban.

Mewakili Kapolres Lamsel, AKBP Zaky Alkazar, Kapolsek Penengahan AKP Hendra mengungkapkan, pelaku melakukan aksinya tidak sendirian. Ia dibantu rekannya yang saat ini masih dalam pencarian alias DPO.

“Setelah pelaku berhasil mengambil sejumlah barang dagangan tersebut, mereka kepergok oleh istri korban sedang membawa barang-barang berupa rokok dengan menggunakan tas salempang berwarna coklat. Sebagian barang hasil curian dibawa kabur oleh salah satu

pelaku yang berhasil lolos,” ujarnya, kemarin (20/1).

Usai korban mengetahui bahwa warung sembakonya telah dimasuki maling, lanjut AKP Hendra, korban kemudian melapor ke Polsek Penengahan.

“Tak lama setelah laporan tersebut, anggota reskrim Polsek Penengahan yang tengah melakukan patroli langsung menuju TKP dan berhasil mengamankan satu pelaku bersama warga setempat,” lanjutnya.

Pelaku, kata AKP Hendra merupakan, residivis tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Curat), yang kerap beraksi di wilayah Bakauheni-Ketapang. Polisi berhasil menyita barang bukti 2 bungkus rokok Marlboro, 2 bungkus rokok MLD warna putih, 1 bungkus rokok MLD Black, 2 bungkus rokok surya pro warna merah, 1 bungkus rokok gudang baru, 1 bungkus rokok magnum warna biru.

Kemudian, 1 bungkus rokok magnum black, 1 bungkus rokok surya 12, 1 bungkus rokok GP, 1 botol minuman ichiocha, 1 buah tas salempang warna coklat, 1 bilah pisau dapur berwarna hitam, 1 sarung pisau kayu warna coklat, dan 1 buah gembok rusak. (**frd/lim/apr**)



SAMBUT : Bupati Lampung Selatan sambut kedatangan Wakapolda Lampung di rumah dinas Bupati Lampung Selatan, Rabu (20/1).

Wakapolda Minta Warga Diedukasi Soal Covid-19

LAMSEL - Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto menerima kunjungan silaturahmi Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Lampung, Brigjen Pol Drs. Subiyanto di rumah dinas bupati setempat, Rabu siang (20/1)

Kehadiran Wakapolda Lampung didampingi sejumlah Pejabat Tinggi Polda. Tiba di rumah dinas bupati bupati, dirinya langsung disambut Bupati beserta jajaran Forkopimda

Lampung Selatan, Sekretaris Daerah Kabupaten, Thamrin beserta jajaran.

Diketahui, kunjungan Wakapolda Lampung ke Lampung Selatan itu dalam agenda ramah tamah bersama anggota Forkopimda Lampung Selatan di Polres Lampung Selatan. Momen kunjungan singkat itu dimanfaatkan Bupati Lampung Selatan untuk meningkatkan silaturahmi dengan menjamu makan siang bersama Waka-

polda Lampung.

Nanang juga sempat mengajak jenderal bintang satu itu untuk melihat keadaan kebun edukasi yang memang berada di belakang rumah dinas bupati setempat.

“Tidak ada agenda khusus. Kita jajaran Pemkab Lampung Selatan dan anggota Forkopimda hanya bersilaturahmi dengan Wakapolda,” ujar Nanang ditemui usai pertemuan itu.

Hanya saja kata Nanang,

dalam pertemuan itu, Wakapolda Lampung meminta jajaran Pemkab dan jajaran Forkopimda untuk bersama-sama menekan laju penyebaran Covid-19 semakin meluas.

“Iya, tadi Wakapolda sempat membahas Covid-19. Kita diminta untuk turun dari mulai tingkat kabupaten hingga ke desa-desa untuk menekan penyebaran Covid-19,” tuturnya.

Nanang mengatakan, salah

upaya pihaknya untuk menekan penyebaran Covid-19 adalah dengan meningkatkan sosialisasi ke desa-desa hingga ke tingkat RT.

“Seluruh kepala desa juga sudah kita panggil untuk meningkatkan kembali tim gugus tugasnya. Selain itu kita juga terus mengedukasi masyarakat untuk disiplin menerapkan 3M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan),” imbuh Nanang. (**lim/apr**)

Kades Harus Sosialisasi Pentingnya Prokes

LAMSEL - Bupati Lampung Selatan (Lamsel), H. Nanang Ermanto, kembali meminta kepada Kepala Desa (Kades) untuk gencar melakukan so-

sialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya penerapan protokol kesehatan (prokes). Hal itu, diungkapkannya, pada acara sosialisasi penanganan Co-

vid-19, di Aula Sebuk, rumah dinas setempat, Rabu (20/1).

Penyebaran Covid-19 di Lamsel mulai tak terkendali. Bahkan, kabupaten berjujur

khagom mufakat ini telah mendapatkan predikat zona merah per 10 Januari 2021 lalu. Orang nomor satu di kabupaten ini meminta ke-

pada Kepala Desa untuk secara terus-menerus mensosialisasikan betapa pentingnya melaksanakan prokes.

“Lampung Selatan sudah zona merah. Terutama wilayah Natar, Jatiagung, Tanjung Bintang, Kalianda dan Sidomulyo. Kades dalam wilayah ini harus lebih aktif menyampaikan imbauan kepada masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Virus ini semakin merajalela,” ujar Nanang.

Tak hanya itu, Nanang juga meminta kepada Kepala Desa untuk menyampaikan kepada masyarakat akan pentingnya vaksinasi.

“Sampaikan ke masyarakat, jika tiba saatnya untuk divaksin, laksanakan. Jangan takut. Beri motivasi kepada masyarakat, bahwa vaksin itu penting. Saya dan pak Sekda kemarin sudah divaksin,” kata Nanang. (**lim/apr**)



RAKOR: Bupati Lamsel didampingi Sekda M. Thamrin saat rakor bersama kepala desa, di Aula Sebuk, rumah dinas setempat, Rabu (20/1).

Lelang Barang Rampasan Masih Koordinasi

KALIANDA - Pemkab Lampung Selatan masih melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandarlampung, untuk melelang barang rampasan milik terpidana kasus suap fee proyek Zainudin Hasan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lampung Selatan.

Namun, sejauh ini belum dapat dipastikan obyek lelang lantaran masih dalam tahapan pemilahan barang yang kini telah masuk dalam aset daerah. Hal ini ditegaskan Sekkab Lamsel, Thamrin, S.Sos, MM kepada Radar Lamsel, Rabu

(20/1) kemarin.

Menurutnya, tim yang telah dibentuk masih melakukan koordinasi dengan KPKNL dalam hal penyiapan berkas dan kelengkapan awal.

“Kita masih koordinasi. Belum ada obyek sitaan yang akan dilelang. Kita pilah dan pilih dulu apa saja yang kira-kira akan dilelang duluan,” kata Thamrin kepada Radar Lamsel, Rabu (20/1) kemarin.

Dia menambahkan, barang sitaan yang telah masuk ke dalam aset daerah itu tengah disiapkan berkas administrasi untuk dilelang.

“Pada intinya kita masih akan memilah mana yang la-

yak dilelang duluan sesuai dengan kebutuhannya,” imbuhnya.

Masih kata Thamrin, pelaksanaan lelang melalui lembaga independent ini bakal dimulai pada awal Februari mendatang. Hal ini berdasarkan koordinasi tim dengan KPKNL Bandarlampung.

“Kita pastikan belum ada satupun barang yang telah dilelang. Kalau tidak salah akan mulai tahapan lelangnya pada awal Februari 2021 nanti,” lanjutnya.

Saat ditanya mengenai pers rilis dari Jubir KPK terkait perihal serupa, Thamrin mengaku tidak mengetahuinya.

Sebab, secara administrasi seluruh barang rampasan telah diserahkan kepada pemerintah daerah.

“Kalau masalah itu saya kurang tahu. Karena secara administrasi semua barang rampasannya sudah diserahkan ke daerah,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, satu persatu barang milik Zainudin Hasan terpidana suap fee proyek yang disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal dilelang.

Pelaksanaan lelang sendiri akan dilakukan pada Selasa 16 Februari 2021 mendatang. Tepat pukul 08.30 WIB. Dengan cara penawaran mela-

lui *closed bidding* dengan mengakses situs www.lelang.go.id. Hasil dari lelang barang sitaan tersebut nantinya bakal menjadi dimasukan ke kas negara.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, lelang ini mengacu pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 113 K/Pid.Sus/2020 tanggal 28 Januari 2020 atas nama Zainudin Hasan.

“KPK akan melakukan lelang eksekusi barang rampasan di muka umum. Melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandarlampung,” katanya, Selasa (19/1). (**rnn/apr**)



Dua KWT Terima Rp100 Juta dari Bupati Tanggamus

TANGGAMUS - Bupati Tanggamus Hj. Dewi Handajani, memberikan bantuan secara simbolis kepada Dua (2) Kelompok Wanita Tani (KWT), Rabu (20/1). Bantuan secara simbolis diberikan kepada KWT Tirta Soya Pekon Dadapan dan KWT Melati Pekon Simpang Kanan, Kecamatan Sumberejo. Kegiatan ini juga menjadi

ajang bersilaturahmi antara bupati dengan KWT Tanggamus. Turut mendampingi bupati, Inspektur Ernalina, Kepala Dinas Pertanian Catur Agus Dewanto, Camat Sumberejo Pardi serta Uspika Kecamatan Sumberejo. Dalam sambutannya, Dewi mengatakan, bantuan yang disampaikan

merupakan upaya Pemkab Tanggamus untuk membantu KWT untuk meningkatkan kesejahteraan anggota KWT dan petani di Kabupaten Tanggamus. Adapun bantuan yang diberikan berupa mesin penggilingan kopi, penggilingan bumbu, penggilingan mie, alat sealer, mesin sablon, yang

bersumber dari Kementerian Pertanian. Selain itu terdapat juga bantuan vacuum frying blower atau pendingin roasting kopi melalui Dinas Pertanian setempat. “Beberapa alat yang sampai saat ini masih dalam proses indent, belum sampai kesini karena alat tersebut kita pesan sesuai kebutuhan

KWT disini. Sehingga, perlu proses pembelian alat yang disesuaikan dengan kebutuhan kita,” katanya. Adapun nilai bantuan secara keseluruhan yang diberikan adalah sebesar Rp50 juta masing-masing KWT, atau total Rp100 juta. “Saya berharap, dengan adanya bantuan ini, maka kondisi petani

kita lebih baik lagi dan lebih sejahtera. Saya juga berpesan kepada KWT yang mendapat bantuan untuk merawat dan memanfaatkan bantuan ini dengan baik, sehingga produksi atau hasilnya meningkat,” ujarnya. Dewi Handajani menambahkan, bahwa Pemerintah Daerah senantiasa berupaya serius

dalam memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh masyarakat. “Ini tentu menjadi komitmen kami pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan visi dan misi kami, guna memberikan kesejahteraan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara merata,” imbuhnya. **(win/apr)**

Diduga Langgar Prokes, Polisi Periksa Sohikul Hajat

TANGGAMUS - Diduga langgar protokol kesehatan (prokes), Polsek Talang Padang melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap HF selaku sohikul hajat dan AG selaku ketua panitia hajatan.

Pasalnya, kedua orang tersebut merupakan orang yang paling bertanggungjawab pada resepsi khitanan di rumah HF, di Pekon Banjar Negeri, RT 001/RW 001, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus.

Kapolsek Talang Padang Polres Tanggamus AKP Sarwani, SE. MM mengatakan, keduanya dilakukan pemeriksaan atas dugaan tindak pidana melawan perintah petugas. Yang sedang melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang, melanggar protokol kesehatan dalam resepsi khitanan yang terjadi pada Sabtu (16/1).

“Dugaan pelanggaran protokol kesehatan terjadi

sekitar pukul 14.00 WIB di rumah HF di Pekon Banjar Negeri, Gunung Alip atas pelaporan Bhabinkamtibmas,” kata AKP Sarwani mewakili Kapolres Tanggamus AKBP Oni Prasetya, SIK, Rabu (18/1).

AKP Sarwani menerangkan, sebelum pelaksanaan resepsi, personel gabungan secara bergantian telah memberikan himbauan. Agar kegiatan resepsi khitanan tersebut tetap mematuhi protokol kesehatan guna meminimalisir adanya klaster baru serta untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Adapun himbauan yang pertama dilakukan oleh Pj. Kepala Pekon Banjar Negeri beserta aparaturnya Pekon Banjar Negeri pada Senin, tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WIB di rumah HF di Pekon Banjar Negeri.

Kemudian imbauan yang kedua dilakukan oleh

Bhabinkamtibmas dan Babinsa Pekon Banjar Negeri, Badan Desa Pekon Banjar Negeri beserta Petugas Puskesmas Gunung Alip, pada Rabu (13/1) sekira pukul 10.00 WIB di rumah HF.

Lalu, imbauan yang ketiga dilakukan oleh Kapolsek Talang Padang, Camat Kecamatan Gunung Alip, Bhabinkamtibmas dan Babinsa Pekon Banjar Negeri pada Kamis (14/1) sekira pukul 15.30 WIB.

Namun, pada saat pelaksanaan resepsi khitanan tersebut tamu undangan tidak mematuhi atau menerapkan protokol kesehatan sesuai imbauan yang telah dijelaskan sebelum kegiatan berlangsung.

“Atas terjadinya dugaan pelanggaran protokol kesehatan di resepsi khitanan tersebut, Bhabinkamtibmas melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Talang Padang untuk ditindak

lanjuti,” terangnya.

Adapun barang bukti yang diamankan, kata AKP. Sarwani, berupa rekaman video dan foto yang diduga menggambarkan tempat atau lokasi resepsi khitanan yang diadakan di rumah HF pada Sabtu (16/1).

Ditambahkan Kapolsek, tindakan kepolisian yang telah dilakukan dalam dugaan perkara tersebut dengan membuat laporan polisi LP/A-15/1/2021/Polda Lampung/Res Tgms/Sek Talang, tanggal 16 Januari 2021.

Kemudian, juga telah melakukan cek dan Olah TKP, memeriksa saksi-saksi guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

“Terhadap keduanya tidak dilakukan penahanan dan sementara dipersangkakan pasal 216 KUHPidana ancaman penjara paling lama empat bulan dua minggu,” pungkasnya. **(win/apr)**



Musrenbang Pasar Madang Bahas Pembangunan

TANGGAMUS - Rencanakan pembangunan infrastruktur tahun 2021, Kelurahan Pasar Madang, Kecamatan Kotaagung, Tanggamus gelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan, di Aula Kantor Kelurahan, kemarin (20/1).

Dalam Musrenbang tersebut hadir Lurah Pasar Madang Dede Chandra beserta jajaran, seluruh kepala Rukun Tetangga (RT) yaitu 17 RT yang ada di wilayah Kelurahan Pasar Madang, 4 Kepala Lingkungan dan tokoh masyarakat setempat.

Tampak juga Babinkamtibmas Polsek Kotaagung Aiptu Suhaqli, Babinsa Koramil Kotaagung Sertu Walid diwakili Serda Antoni, Kasi Trantib Kecamatan Safaruddin serta staf.

Menurut Lurah Pasar Madang Dede Chandra dalam Mus-

renbang Kelurahan ini dibahas rencana prioritas pembangunan infrastruktur masing-masing RT yang berada dalam wilayah Kelurahan Pasar Madang untuk tahun 2021.

Adapun kelanjutan dari Musrenbang Kelurahan adalah Musrenbang Kecamatan dan akhirnya pada Musrenbang Kabupaten.

“Dari musrenbang Kelurahan ini kami input data usulan pembangunan skala prioritas masing-masing RT, kemudian akan kami tindak lanjuti dengan survey lapangan dalam rangka menentukan titik koordinat, selanjutnya data akan kita masukkan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang terintegrasi Pemerintah Kabupaten. Kemudian skala prioritas pembangunan akan kita usulkan saat Musrenbang Kecamatan,” katanya.

Dede Chandra menambah-

kan selain membahas rencana pembangunan infrastruktur dalam Musrenbang juga dimusyawarahkan terkait persoalan persoalan yang ada di masyarakat setempat. Seperti persoalan keamanan dan ketertiban, kemudian juga terkait penanganan pencegahan penyebaran virus corona juga dibahas.

“Tadi ada usulan mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan dengan ronda malam bergiliran warga, karena mulai adanya jenis pencurian dimalam hari. Nah persoalan itu akan kita tindak lanjuti, seperti pembuatan pos ronda apa swadaya atau bagaimana. Juga kami menyempatkan diri sosialisasi program kebiasaan baru sesuai perda Kabupaten Tanggamus dalam penanganan covid 19, yakni tetap selalu menerapkan Prokes seperti 3 M,” Imbuhnya. **(win/apr)**



TUBABA - Klaster pesta hajatan yang tercatat menyumbangkan beberapa Kasus Covid-19 dan upaya penanganan Covid-19 di Tubaba yang dalam sebulan terakhir semakin meningkat, menjadi topik bahasan penting dalam rapat terpadu Satgas Covid-19 Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba), Rabu (20/1) di Ruang Rapat Utama (RRU) Bupati Tubaba.

TUBABA - Kluster pesta hajatan yang tercatat menyumbangkan beberapa Kasus Covid-19 dan upaya penanganan Covid-19 di Tubaba yang dalam sebulan terakhir semakin meningkat, menjadi topik bahasan penting dalam rapat terpadu Satgas Covid-19 Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba), Rabu (20/1) di Ruang Rapat Utama (RRU) Bupati Tubaba.

“Hal penting yang menjadi keputusan rapat Satgas Covid-19 Tubaba hari ini antara lain terkait dengan penghentian sementara pesta hajatan warga, penegakan prokes, mendukung vaksinasi Covid-19 dan pengaktifan kembali Satgas Covid-19 sampai ke tingkat Tiyuh se-Tubaba,” terang Sofyan Nur, S.Sos., M.IP Plt. Asisten I bidang Pemerintahan mewakili ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Tubaba Bupati H. Umar Ahmad, SP kepada sejumlah awak media sesuai rapat.

Lebih lanjut dikatakan Sofyan Nur yang juga Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh Tubaba, bahwa seluruh hasil rapat akan segera dilaporkan kepada Bupati H. Umar Ahmad, SP untuk meminta petunjuk dan arahan lebih lanjut.

Sementara itu, sekretaris dinas Kesehatan Eka Riana, M.Kes yang mewakili Kadiskes Tubaba Majril, Ns., M.Kes mengatakan, untuk tahap awal pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Tubababa akan dilakukan kepada seluruh tenaga kesehatan (Nakes) yang tersebar di daerah yang berjuduk Bumi Ragemai Mangei Wawai.

“Tahap awal sesuai yang diusulkan kita akan lakukan Vaksin Covid-19 kepada 1.037 tenaga kesehatan Tubaba. Untuk penyimpanan obat, disink Tubaba memiliki prizer dan kulkas vaksin digudang farmasi,” ungkap Eka Riana.

Pada sisi lain, Waka Polres Tubaba Kompol Tri Hendro, SH mengatakan, bahwa pihaknya masih menunggu instruksi selanjutnya dari Satgas Covid-19 Tubaba, guna pelaksanaan penegakan disiplin protokol kesehatan (Prokes) Covid-19 secara terpadu yang akan melibatkan pihak TNI, Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan disubh Tubaba.

“Selama ini memang Polres Tubaba terus bergerak, menghimbau masyarakat agar taat Prokes untuk kebaikan dan kesehatan bersama, terkait dengan penegakan disiplin kita masih menunggu instruksi Satgas Covid-19,” ujarnya.

Dikatakan oleh Kabag Hukum Setdakab Tubaba, Budiyanto, SH dalam rapat bahwa dalam hal penegakan disiplin Covid-19 Gubernur Lampung telah menerbitkan Pergub nomor 45 tahun 2020 tentang pedoman penerapan disiplin Covid-19. **(snr/esn)**

TUBABA - Apel rutin kendaraan dinas (Randis) yang merupakan Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Tulang bawang Barat (Tubaba), Rabu (20/1) yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tubaba dilapangan Pemkab Tubaba, dimaksudkan untuk pendataan dan pengamanan aset daerah.

TUBABA - Apel rutin kendaraan dinas (Randis) yang merupakan Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Tulang bawang Barat (Tubaba), Rabu (20/1) yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tubaba dilapangan Pemkab Tubaba, dimaksudkan untuk pendataan dan pengamanan aset daerah.

“Randis ini peruntukannya untuk kepentingan pegawai Pemda Tubaba, tapi dalam pelaksanaannya ada namanya pinjam pakai dengan asumsi dipandang penting dan perlu jelas oleh pimpinan,” terang Faidil Falerie, SE.,MM Kabid Barang Milik Daerah pada BPKAD Tubaba saat ditemui Lampung News-paper sesuai apel randis diurus kerjanya.

Lebih lanjut dikatakan kapid Faidil Falerie, SE.,MM, bahwa Barang Milik Daerah bersumber dari Hibah dan pembelian daerah. Aset daerah dapat berupa kendaraan, tanah, gedung bangunan, mebel dan aset lainnya.

“Yang saat ini juga sedang kita data dan tertibkan adalah aset daerah yang di dapat dari proses pelimpahan aset. Karena, tadinya kita masih tergabung di Kabupaten Tulangbawang setelah pecah menjadi kabupaten Tubaba ada pelimpahan Aset ke kita, yang kadang tidak ada suratnya dan sesuai dengan kondisi yang ada saja” jelasnya.

Kedepan, lanjutnya, semua Aset daerah milik Pemkab Tubaba berupa tanah akan di sertifikasi secara bertahap. Karena saat ini pihaknya sudah bekerjasama dengan BPN. Kendatipun menurutnya, membutuhkan proses dan waktu penerbitan sertifikasinya oleh pihak BPN.

“Alhamdulillah pada tahun 2020 sekitar 80 sertifikat tanah milik Pemkab Tubaba sudah diterbitkan oleh BPN, termasuk tanah kompleks Pemkab ini dan tanah kompleks Islamik Center Tubaba,” pungkasnya.

Sementara itu, Siregar, SE.,MM Kasubbid penghapusan Aset BPKAD Tubaba mengatakan, bahwa apel rutin randis tersebut di hadiri lebih dari 50 % kendaraan dinas dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tubaba.

TULANG BAWANG - Ketua Pengadilan Negeri (PN) Menggala, Kabupaten Tulangbawang, Lampung Aris Fitra Wijaya positif terpapar virus corona (Covid-19).

TULANG BAWANG - Ketua Pengadilan Negeri (PN) Menggala, Kabupaten Tulangbawang, Lampung Aris Fitra Wijaya positif terpapar virus corona (Covid-19).

Saat dihubungi melalui via WhatsApp, Aris Fitra Wijaya membenarkan bahwa ia terkena covid-19, ia juga menjelaskan pada Jumat (15/01), dirinya merasakan tubuh demam tinggi, perkiraan hanya sakit biasa.

"Pada hari Selasa (19/01) saya melakukan tes swab, hasilnya Masya Allah saya terkejut karena positif Covid-19," terang Aris Fitra Wijaya, Rabu, (20/01).

Aris mengatakan, bahwa dirinya sekarang masih dirawat di Rumah Sakit Immanuel Bandarlampung. Dirinya juga meminta doa kepada semua agar bisa diberikan Allah kesehatan sembuh dari Covid-19.

“Untuk perjalanan luar kota saya tidak pernah keluar kota, jadi memang kita harus selalu melindungi diri kita dengan cara mematuhi protokol kesehatan. Agar terhindar dari Covid-19,” jelasnya.

Dijelaskan Aris Fitra Wijaya, pimpinan PN Menggala saat ini

akan dipimpin oleh wakil ketua, yakni Muhammad Ismail.
 “Walaupun saya terkena Covid-19, pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan,” tuturnya. **(fay/mad/esn)**

TULANG BAWANG - Dinas Kesehatan Kabupaten Tulangbawang menggelar sosialisasi regulasi daerah dalam penanganan stunting sebagai kabupaten lokus stunting di ruang rapat utama lantai II kantor Bupati setempat, Rabu (20/1).

Kabid Kesmas Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Lampung Uki Basuki SKM, M.Kes yang juga selaku narasumber pada kegiatan itu menjelaskan, stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kondisi

gagal tumbuh pada anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama serta terjadinya infeksi berulang.

"Pengaruh pola asuh menjadi peran krusial dalam 1000 HPK, yang mana anak masuk dalam golongan stunting apabila panjang atau tinggi badan menurut umurnya lebih rendah dari standar nasional yang berlaku," jelasnya.

Uji Basuki mengatakan, adapun upaya penurunan stunting dilakukan melalui dua intervensi, yaitu intervensi gizi spesifik untuk mengatasi penyebab langsung dan intervensi gizi

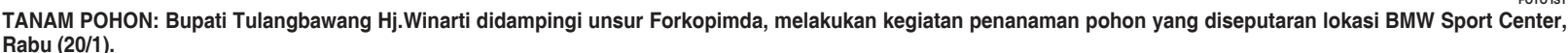
TULANG BAWANG - Dinas Kesehatan Kabupaten Tulangbawang menggelar sosialisasi regulasi daerah dalam penanganan stunting sebagai kabupaten lokus stunting di ruang rapat utama lantai II kantor Bupati setempat, Rabu (20/1).

Kabid Kesmas Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Lampung Uki Basuki SKM, M.Kes yang juga selaku narasumber pada kegiatan itu menjelaskan, stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kondisi

gagal tumbuh pada anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama serta terjadinya infeksi berulang.

"Pengaruh pola asuh menjadi peran krusial dalam 1000 HPK, yang mana anak masuk dalam golongan stunting apabila panjang atau tinggi badan menurut umurnya lebih rendah dari standar nasional yang berlaku," jelasnya.

Uji Basuki mengatakan, adapun upaya penurunan stunting dilakukan melalui dua intervensi, yaitu intervensi gizi spesifik untuk mengatasi penyebab langsung dan intervensi gizi



TULANG BAWANG Jsa melantik pejabat eselon III dan IV, Bupati Tulangbawang Hj. Winarti didampingi unsur Forkopimda, melakukan kegiatan penanaman pohon yang disuportkan lokasi BMW Sport Center, Rabu (20/11).

Penanaman ini sebagai bentuk penghijauan disuportkan lokasi BMW Sport Center yang beberapa hari lalu telah direstorasi oleh Bupati Tulangbawang tersebut.

Adapun jumlah pohon yang ditanam sebanyak 106 pohon yang terdiri dari pohon sukun dan pohon nangka serta pohon teduh lainnya.

Bupati Tulangbawang Hj. Winarti berharap dengan ada-

TULANG BAWANG Jsa melantik pejabat eselon III dan IV, Bupati Tulangbawang Hj. Winarti didampingi unsur Forkopimda, melakukan kegiatan penanaman pohon yang disuportkan lokasi BMW Sport Center, Rabu (20/11).

Penanaman ini sebagai bentuk penghijauan disuportkan lokasi BMW Sport Center yang beberapa hari lalu telah direstorasi oleh Bupati Tulangbawang tersebut.

Adapun jumlah pohon yang ditanam sebanyak 106 pohon yang terdiri dari pohon sukun dan pohon nangka serta pohon teduh lainnya.

Bupati Tulangbawang Hj. Winarti berharap dengan ada-



TUBABA - dr. Ridho dari UPTD Puskesmas Kartaraharja mengkonfirmasi 18 warga Tiyuh Kartaraya, Kecamatan Tulangbawang Udik Kabupaten Tu-

TUBABA - dr. Ridho dari UPTD Puskesmas Kartaraharja mengkonfirmasi 18 warga Tiyuh Kartaraya, Kecamatan Tulangbawang Udik Kabupaten Tu-

lagubang Barat (Tubaba) yang sebelumnya dinyatakan terkonfirmasi positif Covid-19, saat ini berdasarkan hasil pemeriksaan swab dinyatakan non Reaktif.

“Alhamdulillah berdasarkan hasil swab yang sudah keluar hari ini, saya juga sudah baca semuanya non reaktif. Saya terimakasih kepada semua pihak, karena covid-19 ini multi aspek, multi sektoral baik pihak TNI, Polri, RSUD Tubaba, pemerintahan Tiyuh Kartaraharja, Kar-

teranya, pemerintah Kecamatan Tulang Bawang Udik dan semua pihak,” Kata dr. Ridho pada Rabu (20/1) saat pemulangan 18 warga dari rumah Isolasi mandiri Covid-19 di RK.04 Kartaraya.

Diketahui sebelumnya, pihak RSUD Tubaba melakukan

Sementara itu, Camat Tulangbawang Udik (TBU) yang diwakili Sekcam Karbisno, S.Pd mengatakan, bahwa pemerintah Kecamatan TBU mengapresiasi semua pihak yang telah membantu pelaksanaan isolasi warga sehingga berjalan dengan lan-

“Terima kasih kepada pihak Puskesmas, Dinas Kesehatan, dan Tim Satgas Covid-19 Tubaba yang sudah membantu dan mengurus kami selama ini, semoga Covid-19 ini segera menghilang,” pungkasnya. (snr/esn)

Salisirkan Regulasi Penanganan Stunting

“Upaya penurunan stunting akan lebih efektif apabila intervensi gizi spesifik dan sensitif dilakukan secara integritas atau terpadu,” ujar Uki Basuki.

Ditempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungbawang Fatoni mengatakan, adapun tujuan sosialisasi regulasi terkait stunting yaitu sebagai kerangka acuan bagi Kabupaten Tulungbawang dalam menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran, tindak lanjut rekomendasi berdasarkan hasil analisa situasi,

menyusun rencana aksi daerah percepatan penurunan stunting.

Berdasarkan riset kesehatan dasar riskedasa tahun 2018 angka stunting di Kabupaten Tulung Bawang mencapai 32,49%, sedangkan pada tahun 2019 berdasarkan studi status gizi balita Indonesia SSGBI sebesar 15,39% dan tahun 2020 berdasarkan grebek stunting bulan Februari sebesar 12,67% dan gerebek stunting bulan Agustus 11,17%. Dan berkat 25 program bergerak

kerjasama yang baik dari seluruh perangkat daerah dapat menekan angka stunting di Kabupaten Tulungbawang.

“Alhamdulillah, Kabupaten Tulungbawang saat ini step by step terus memperjuangkan gizi anak guna menekan angka stunting yang pada tahun 2018 mencapai 32,49%, dan catatan terakhir berdasarkan Grebek Stunting pada bulan Agustus tahun 2020 menurun menjadi 11,17%” tandasnya. (mad/esn-)

nya penanaman pohon tersebut dapat menambah keasrian lokasi taman BMW Sport Center, sekaligus dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

“Apalagi pohon yang dinam salah satunya merupakan lagi kedepannya,” tandasnya.
(**mad/esn**)

TULANG BAWANG - Bupati Tulangbawang, Hj.Winarti secara langsung melantik 53 pejabat eselon III dan IV yang terdiri dari pejabat administrator dan pejabat pengawas yang berlangsung di BMW Sport Center Kecamatan Menggala, Rabu (20/1).

TULANG BAWANG - Bupati Tulangbawang, Hj.Winarti secara langsung melantik 53 pejabat eselon III dan IV yang terdiri dari pejabat administrator dan pejabat pengawas yang berlangsung di BMW Sport Center Kecamatan Menggala, Rabu (20/1).

Hadir dalam pelantikan tersebut, Sekretaris Daerah, Anthoni, Kajari Tulangbawang, Kapolres, Dandim 0426, serta pejabat setempat lainnya diundang. Pemak Tulangbawang

Bupati Tulangbawang Hj. Winarti mengatakan, kegiatan pelantikan ini salah satu momen rasa syukur untuk lebih memperbaiki diri sekaligus penyerangan dalam pekerjaan dilindungi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulangbawang.

"Suatu hal biasa dilindungi pemerintah daerah adanya penyerangan. Tunjukkan bahwa saudara bekerja ada regulasi yang mengaturnya, loyalitas terhadap pimpinan itu jelas sesuai dengan regulasi 25 program unggulan bergerak melayani warga yang pro rakyat semoga diinovasikan dengan baik untuk melayani masyarakat," ungkap Winarti.

Bagi yang muda, lanjut Wi-narti, pemerintah daerah mem-berikan peluang atau kesem-patan seluas-luasnya kepada ASN yang muda tanpa men-inggalkan yang tua atau senior dalam mengembangkan potensi atau inovasi untuk berkari-er di kabupaten yang berjuruk Sai Bumi Nengah Nyanpur ini

Diketahui, 53 orang pejabat yang dilantik tersebut terdiri dari 30 orang pejabat Eselon III dan 23 orang pejabat Eselon IV. Dimana beberapa diantaranya antara lain, Arya Ganesa ST, MT sebelumnya menjabat sebagai Kabag infrastruktur dan pengembangan wilayah badan perencanaan pembangunan daerah penelitian dan pengembangan menjadi sekretaris badan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Susilawati S.STP, MH sebelumnya menjabat sebagai Kabag administrasi pem-



Dua Warga Binaan Lapas Metro Terpapar Covid-19

METRO - Dua warga binaan lembaga pemasyarakatan (Lapas) kelas IIA Kota Metro terpapar Covid-19. Kasus ini merupakan kasus pertama kali yang terjadi di Lapas Metro.

Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Kalapas kelas IIA Kota Metro Muchamad Mulyana membenarkan hal tersebut.

“Iya benar warga binaan kami ada dua orang yang terpapar Covid-19. Keduanya adalah YP (20) dan S (43). Hasil itu didapat dari rapid test masal terhadap 300 narapidana pada tanggal 7 Januari 2021 lalu. Dari rapid masal tersebut, ada pula 10 warga binaan yang reaktif dan telah kita lakukan isolasi di ruang tersendiri selama 14 hari sambil menunggu hasil swab,” kata Kalapas Metro, Rabu (20/1)

Kalapas juga menjelaskan, dua orang tersebut merupakan narapidana kasus pembunuhan dan penyalahgunaan narkoba.

“Kami tidak tahu, mereka tertular dari mana. Tim Dinas Kesehatan menjelaskan ini merupakan kasus orang tanpa gejala (OTG), dan keduanya telah dilakukan isolasi di RSUD A.Yani Kota Metro, guna perawatan secara intensif. Sedangkan untuk delapan orang yang reaktif kita pindahkan ke ruang tahanan khusus isolasi Covid-19,” jelasnya.

Sementara itu, Wru bicara Covid-19 Kota Metro PJ Misnan, melalui sambungan WhatsApp melaporkan terdapat penambahan sembilan orang positif Covid-19.

“Bertambah lagi sembilan orang, total ada 411 kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Metro,” singkatnya. **(uno/esn)**

Ketua Fraksi PDIP Pertanyakan Santunan Bagi Korban Covid-19

METRO - Ketua Fraksi PDIP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro Basuki mempertanyakan alokasi dana santunan bagi ahli waris korban meninggal akibat Covid-19.

Dana tersebut sebesar Rp15 juta per jiwa seperti tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia Nomor 427/3.2/BS.01.02/06/2020 tentang penanganan perlindungan sosial bagi korban meninggal dunia akibat Covid-19

Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi PDIP-P DPRD Kota Metro, Basuki. Menurutnya, sesuai aturan perundangan dan petunjuk Kemensos terkait santunan bagi ahli waris warga yang meninggal akibat Covid-19 harus segera dianggarkan dan disampaikan kepada yang berhak.

“Kami mempertanyakan, dari bulan Juni 2020 itu, aturan dari Kemensos itu sudah kita terima dan diketahui. Ya harus segera dianggarkan, kenapa harus tunggu nanti. Seharusnya itu sudah masuk dalam perencanaan penanganan Covid-19 ini,” kata Basuki kepada media di gedung DPRD Kota setempat, Rabu (20/1).

Dirinya juga menghimbau Walikota Metro Achmad Pairin untuk segera meniadakanlanti edaran Kemensos serta merealisasikan hak para pahlawan Covid-19 seperti tenaga medis dan petugas pemakaman jenazah Covid-19.

“Kami mengimbau kepada pemerintah Kota Metro dalam hal ini bapak Walikota untuk menyegerakan kewajibannya berkaitan dengan dampak masyarakat yang terkena Covid-19. Kemudian para dokter, perawat, dan petugas penguburan jenazah itu segera dianggarkan dan disampaikan sesuai dengan hak nya,” ucapnya.

Dirinya juga meminta pemerintah segera merealisasikan jangan menunggu lagi, karena surat edaran dari Kemensos tersebut terbit sejak tanggal 18 Juni 2020, namun kenapa tidak dianggarkan. Ia bahkan mempertanyakan peran pemerintah dalam membantu pasien Covid-19 serta keluarga yang terdampak.

“Selama ini berarti yang meninggal dunia masyarakat Kota Metro akibat Covid-19 belum ada santunan dong. Tahun 2020 kan sudah dialokasikan Rp 46 miliar dan di tahun 2021 anggaran Covid-19 ditambah Rp 10 miliar, ada kemungkinan berubah atau ditambah melihat situasi dan kondisi kedepan,” pungkask Basuki.

Meski telah tujuh bulan sejak diterbitkannya surat edaran Kemensos tersebut, Walikota Metro Achmad Pairin mengaku masih mempelajari edaran itu.

“Surat Edaran Kementerian Sosial masih kita pelajari dan masih dalam pembahasan kita bersama melalui tim penganggaran,” kata Wali Kota Metro Achmad Pairin saat dikonfirmasi media pada Selasa, (19/1) kemarin.

Surat yang beredar luas tersebut ditandai dengan Kop surat mengatasnamakan Kementerian Sosial Republik Indonesia Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial, Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan disertai alamat Jl. Salemba nomor 28 Jakarta Pusat 10430.

Dalam Kop surat itu juga tertulis Telp/Fax : (021) 3100469 Ext : 2308 Laman : <http://www.kemensos.go.id> yang juga ditujukan kepada para kepala dinas sosial Provinsi se-Indonesia. Surat edaran Nomor 427/3.2/BS.01.02/06/2020 tentang penanganan perlindungan sosial bagi korban meninggal dunia akibat virus corona. **(uno/esn)**

Komplotan Curanmor Spesialis Mobil Digulung Polisi

Dua Pucuk Senpi dan Belasan Amunisi Disita

TULANGBAWANG - Polsek Banjar Agung bersama Tekab 308 Polres Tulang Bawang berhasil menangkap komplotan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) spesialis mobil di tiga lokasi yang berbeda pada Rabu (20/1).

“Pagi ini, saya bersama personel Polsek Banjar Agung dan Tekab 308 Polres Tulang Bawang berhasil menangkap 4 pelaku curanmor spesialis mobil. Para pelaku ini ditangkap di tiga lokasi yang berbeda,” ujar Kapolsek Banjar Agung Kopol Devi Sujana, SH, SIK, MH, mewakili Kapolres Tulang Bawang AKBP Andy Siswanto, SIK.

Dikatakan, adapun identitas dari 4 pelaku tersebut yakni berinisial SU (47), berdomisili di Kampung Warga Makmur Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, sedangkan WO als WR (40), AS als CE (55) dan AO als PR (59), mereka merupakan warga Tiyuh Pagar Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

“Pelaku SU, ditangkap pukul 00.15 WIB, saat sedang berada di rumahnya. Pelaku WO als WR, ditangkap pukul 01.16 WIB, saat sedang berada di kolam pemancingan, Dusun Rajawali, Tiyuh Pagar Jaya, Kecamatan Lambu Kibang. Pelaku AS als CE dan AO als PR, ditangkap pukul 03.00 WIB, di Tiyuh Kibang Mulya, Kecamatan Lambu Kibang,” ungkap Kapolsek.

Kapolsek menjelaskan, terungkapnya aksi komplotan curanmor spesialis mobil ini setelah korban Dwi Santoso (42), warga Kampung Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, melapor ke Mapolsek Banjar Agung pada Selasa (19/01).

“Sebelumnya, pada hari Selasa (19/01/2021), pukul 03.00 WIB, komplotan curanmor ini sudah merusak kunci pintu dan sudah merusak kunci stater mobil truck milik korban, namun gagal menghidupkan mesin dan tanpa sengaja klakson mobil tersentuh oleh pelaku. Korban keluar rumah dan para pelaku kabur,” ujar Kapolsek.

Dijelaskan Kapolsek, dari hasil pemeriksaan sementara, komplotan pelaku ini sebelumnya telah berhasil mencuri sebuah mobil pick up jenis grand max warna hitam di Kampung Tunggal Warga. Dari tangan para pelaku, berhasil disita barang bukti (BB) berupa senjata api (senpi) jenis FN, dengan magazin berisi 5 butir amunisi aktif 6 mm, bungkus rokok merk sampoerna yang berisi 10 butir amunisi aktif 6 mm, senpi rakitan jenis revolver yang silindernya berisi 4 butir amunisi aktif 5,5 mm, gagang kunci letter T ukuran 8 mm dan sepeda motor Honda Beat warna hijau putih, BE 6333 QK.

“Untuk kepemilikan senpi dan amunisi ilegal, akan dikenakan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951. Dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun,” tandasnya. **(red)**



PEMBUKAAN: Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona membuka kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022 di Aula Pemkab Pesawaran, Rabu (20/1).

Bupati Dendi Buka Konsultasi Publik RKPD 2022

GEDONGTATAAN - Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona membuka kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022 di Aula Pemkab Pesawaran, Rabu (20/1).

Kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022 tersebut dihadiri para Asisten, para Kepala OPD, dan seluruh camat di Kabupaten di Bumi Andan Jejama.

Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona mengatakan, bahwa konsultasi publik merupakan forum antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah kabupaten Pesawaran tahun 2022 yang bertujuan untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan rancangan awal RKPD, sinkronisasi agenda dan prioritas pembangunan, serta memantapkan pemahaman bersama, baik di kalangan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat tentang pentingnya sinergi kebijakan dan program prioritas pembangunan. Selain itu juga untuk melakukan klasifikasi atas prioritas kegiatan pembangunan sesuai dengan fungsi-fungsi kerangka daerah, sehingga terbangun komitmen bersama antara para pemangku kepentingan dalam pencapaian pembangunan yang berkualitas,

transparan dan akuntabel.

“Saya berharap acara Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD ini dapat menghasilkan kesepakatan prioritas pembangunan di Kabupaten Pesawaran dalam rangka menuju Pesawaran Maju, Makmur dan Sejahtera,” ujar Bupati.

Dijelaskan, konsultasi publik mempunyai peran dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Pesawaran, karena dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran yang akan datang. Konsultasi Publik juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari mekanisme perencanaan, sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Dae-

rah.

“RKPD Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pesawaran 2021-2026, yang menjadi pondasi untuk pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Sesuai dengan visi dan misi saya Tahun 2021-2026 yaitu “Mewujudkan Pesawaran Lebih Maju, Sejahtera dengan Masyarakat yang Produktif” maka tema RKPD Tahun 2022 adalah “Mempercepat Pemulihan Ekonomi Berkualitas untuk mewujudkan Masyarakat Pesawaran Lebih Maju, Sejahtera dan Produktif,” papar Dendi.

Dendi menambahkan, untuk prioritas pembangunan Tahun 2022 adalah Peningkatan kualitas SDM yang sehat jasmani dan rohani cerdas, unggul dan berdaya saing. Pemerintahan infrastruktur wilayah secara berkelanjutan dan berkualitas. Peningkatan iklim investasi dan berusaha yang kondusif. Peningkatan tata kelola, Pemerintahan yang efektif dan layanan publik yang berkinerja tinggi. Dan, mewujudkan desa mandiri sebagai titik berat pembangunan berbasis kemasyarakatan dan potensi lokal.

“Selain itu, ada 35 janji kerja saya untuk 5 tahun ke depan yang bertujuan untuk mewujudkan Pesawaran lebih maju, sejahtera dengan masyarakat yang produktif,” tandasnya. **(esn)**

Babinsa Tulang Bawang Motivasi Calon Prajurit TNI-AD

TULANGBAWANG - Babinsa Kampung Lebu Dalem, Kecamatan Menggala, Sertu Heri Iswanto melaksanakan anjngsana dalam rangka memberikan arahan dan motivasi kepada calon Secata PK Gel 1 TNI-AD tahun 2021, Rabu (20/1).

Dimana, penerimaan calon Secata PK Gel 1 TNI-AD tahun 2021 lebih di prioritaskan putra asli daerah. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat yang tinggal di daerah pulau terluar/perbatasan/pedalaman untuk menjadi prajurit TNI-AD.

Berkaitan dengan hal tersebut Babinsa Koramil 426-02/Menggala

Sertu Heri Iswanto memberikan motivasi kepada calon Prajurit TNI-AD dengan mengatakan bahwa menjadi anggota TNI tidaklah mudah dan tidak cukup hanya mengandalkan minat dan tekad saja.

“Menjadi Anggota TNI di samping harus memiliki minat dan tekad yang kuat juga harus di dukung dengan mental, kemampuan fisik yang bagus, kesehatan yang prima juga kemampuan akademik yang mumpuni. Ketiganya haruslah imbang, dan yang paling penting selalu berdo'a kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan kelancaran dan keberkahan,”

jelasnya.

Disamping itu Sertu Heri Iswanto juga menyampaikan bahwa para peserta seleksi harus mengikuti prosedur pendaftaran dan melaksanakan seleksi dengan benar. Dia berharap para peserta seleksi tidak melauai calo atau melakukan tindakan curang, karena akan merugikan diri sendiri.

“Jangan gampang terpengaruh pada orang lain yang seolah-olah menawarkan jasa baiknya, sebab banyak sekali modus penipuan yang berkedok penawaran jasa masuk Anggota TNI. Pendaftaran masuk TNI itu gratis,” tegasnya. **(red)**

Realiasi DD Sukamandi Prioritaskan Kesepakatan Bersama

WAY LIMA - Dalam meningkatkan infrastruktur desa tahun 2020, Pemerintah Desa Suka Mandi, Kecamatan Way Lima merealisasikan beberapa titik pembangunan rumah warga sebanyak 6 rumah dan pembangunan tembok penahan tanah (TPT) tipe L di Dusun 1, Desa Suka Mandi.

Kami merealisasikan 2 pembangunan untuk rabat beton sepanjang 160 meter dengan lebar 3 meter dan 240 meter dengan lebar 2,5 meter. Selain itu, talud TPT dengan panjang 1 meter dan 1,5 meter dan TPT tipe L sepanjang 200 meter di dusun 1 serta membantu pembangunan 6 rumah warga sebesar Rp.10 juta per rumah,” paparnya.

Kusnadi menambahkan, pelaksanaan pembangunan tersebut bersumber dari realisasi penggunaan dana desa dalam bidang pembangunan sebesar Rp 653,5 juta dari total dana desa tahun 2020 sebesar Rp

terletak di dusun 3 dan dusun 2, talud tembok penahan tanah (TPT) sepanjang 71 meter terletak di dusun 4, membantu pembangunan rumah warga sebanyak 6 rumah dan pembangunan tembok penahan tanah (TPT) tipe L di Dusun 1, Desa Suka Mandi.

Kami merealisasikan 2 pembangunan untuk rabat beton sepanjang 160 meter dengan lebar 3 meter dan 240 meter dengan lebar 2,5 meter. Selain itu, talud TPT dengan panjang 1 meter dan 1,5 meter dan TPT tipe L sepanjang 200 meter di dusun 1 serta membantu pembangunan 6 rumah warga sebesar Rp.10 juta per rumah,” paparnya.

Kusnadi menambahkan, pelaksanaan pembangunan tersebut bersumber dari realisasi penggunaan dana desa dalam bidang pembangunan sebesar Rp 653,5 juta dari total dana desa tahun 2020 sebesar Rp

1,35 miliar.

“Realisasi pembangunan menggunakan dana desa tahap 1 dan tahap 3. Sehubungan dengan adanya refocusing anggaran banyak perubahan dilaporkan AP-BDes kami dan masih banyak pembangunan yang tertunda ditahun 2020 kemarin,” ucapnya.

Selain itu, Kusnadi berharap agar masyarakat tanggap dan aktif mengawal pelaksanaan pembangunan di Desa Suka Mandi sesuai cita-cita bersama untuk kemajuan desa dan masyarakat desa.

“Mari kita bersama sama membangun desa suka mandi sesuai dengan cita-cita kita bersama. Kami mengambil suatu kebijakan melalui Musdes dan saya mengajak masyarakat agar lebih tanggap dengan Desa Suka Mandi dengan mengawal bersama pelaksanaan kegiatan penggunaan dana desa maupun pembangunan di Desa Suka Mandi,” tandasnya. **(eggy/esn)**

Dalam 2 Hari, Kasus Positif Covid-19 di Lambar Bertambah 45 Orang

LAMPUNG BARAT - Kasus terkonfirmasi positif Coronavirus Deases 2019 (Covid-19) di Kabupaten Lampung Barat (Lambar) makin tidak terkendali. Hanya dalam dua hari saja, terjadi penambahan secara signifikan hingga mencapai 45 orang.

Tercatat hari ini, Rabu (20/1) terjadi penambahan positif Covid-19 sebanyak 16 kasus yang tersebar di lima Kecamatan. Yakni, Kecamatan Balikbukit 8 orang, Sukau 2 orang, Belalau 4 orang, Batuketulis 1 orang dan Kecamatan Batubrak 1 orang.

Sehari sebelumnya Selasa 19 Januari juga terjadi penambahan kasus sebanyak 29 orang yang tersebar di lima Kecamatan, yaitu Kecamatan Sumberjaya 5 orang, Waytenong 3 orang, Balikbukit 7 orang, Belalau 12 orang dan Kecamatan Batubrak 2 orang.

Hal itu diungkapkan Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Kepala Bidang Komunikasi Publik Dinas Kesehatan Lambar, Erna Yanti, Rabu (20/1).

Menurutnya, masyarakat harus serius dan mawas diri dalam menyikapi adanya virus yang berasal dari China tersebut, dengan mematuhi larangan yang ada seperti tidak boleh adanya hajatan nikahan dan acara perkumpulan lainnya. Masyarakat juga harus waspada dan menerapkan protokol kesehatan (Prokes).

“Dengan begitu penyebaran virus Corona terkendali dan dapat diminimalisir. Virus ganas ini belum mereda, ini tugas dan tanggungjawab kita bersama-sama. Kami berharap masyarakat selalu waspada dengan ikhtiar disiplin Prokes yakni dengan 3M (Mencuci Tangan, Menjaga Jarak dan Memakai Masker), menunda bergian keluar daerah dan tidak berkerumun,” lanjut Erna berharap.

Untuk diketahui, dengan bertambahnya 16 kasus terkonfirmasi positif covid-19 hari ini, menambah total terkonfirmasi di Kabupaten Kopi ini menjadi 160 kasus, dengan rincian 10 meninggal dunia, men-

jalani isolasi 53 orang dan si-sanya sudah dinyatakan sehat atau sembuh.

Diberitakan sebelumnya, setelah ditetapkan sebagai salah satu daerah zona merah kasus positif Coronavirus Deases 2019 (Covid-19) oleh satuan tugas pusat, Pemerintahan Kabupaten Lampung Barat (Lambar) menetapkan batasan warga dalam beraktivitas.

Ketetapan itu didapat setelah diadakannya rapat dadakan yang dipimpin langsung oleh Bupati Lambar, Parosil Mabsus dan Wakil Bupati Mad Hasnurin, di Rumah Makan Sabah Bekhak, Pekon Sebarus, Kecamatan Balikbukit pada Selasa (19/1).

Bupati Lambar, Parosil Mabsus mengatakan, Lambar kini menjadi daerah yang berisiko tinggi, tak terkendali hingga ditetapkan sebagai salah satu zona merah, dengan begitu pemerintah perlu bergerak cepat guna menekan penyebaran Covid-19.

“Salah satunya dengan membatasi aktivitas kerumunan warga, seperti hajatan, khitanan atau bentuk keramaian lainnya,” ujar Bupati Parosil.

Lebih lanjut dijelaskannya, Pemkab Lambar harus menutup sementara destinasi wisata yang ada. Kemudian, aktivitas tatap muka Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) untuk sementara ini di-tiadakan atau dilaksanakan secara daring (online).

“Selain itu juga diberitahukan kepada masyarakat yang bepergian masuk kedalam zona merah dan pulang untuk melakukan isolasi diri secara mandiri,” ucap Pak Cik sapaan akrabnya.

Dalam rapat terbatas tersebut juga disepakati maklumat Kapolri yang disebarkan ke seluruh masyarakat dan menjadi pedoman bagi warga untuk mentaati protokol kesehatan Covid-19.

“Hal itu bakal menjadi warning bagi siapapun yang membandel. Gelaran yang menimbulkan kerumunan bakal dibubarkan petugas. Ini tidak main-main. Ini untuk keselamatan banyak orang,” tegas Parosil. **(ade/esn)**



Operasi Yustisi Polsek Kedondong Masih Dapati Masyarakat Langgar Prokes

KEDONDONG - Operasi Yustisi yang digelar Polsek Kedondong di beberapa titik lokasi di Kecamatan Kedondong masih mendapati masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan, Rabu (20/1).

Kapolsek Kedondong AKP Amin Rusbahadi mengatakan, operasi yustisi digelar di wilayah hukum Polsek Kedondong seperti tempat fasilitas umum, pasar kedondong dan sejumlah areal perkantoran di Kecamatan Kedondong.

“Sebelum pelaksanaan tugas, dilaksanakan apel kesiapan di Polsek Kedondong. Selanjutnya personel menuju ke pasar kedondong dan melaksanakan himbauan dan teguran serta melakukan tindakan kepada masyarakat yang beraktifitas yang tidak mengenakan masker,” ujar Kapolsek.

Kapolsek mengungkapkan, dalam kegiatan operasi yustisi

tersebut, masih mendapati masyarakat yang masih melanggar protokol kesehatan (prokes), seperti tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) berupa masker.

“Masih banyak masyarakat yang mengabaikan prokes, dan personel langsung memberikan sanksi terhadap pelanggar prokes tersebut,” ucapnya.

Selanjutnya Kapolsek menghimbau agar masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan untuk kebaikan bersama dan mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19 di Kabupaten Pesawaran.

“Kami menghimbau agar masyarakat bisa lebih taat dan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Ini untuk kebaikan bersama dalam mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19 di wilayah Kabupaten Pesawaran,” pungkasnya. **(eggy/esn)**

Target Pajak 2021 Meningkat

GEDONGTATAAN - Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran menargetkan pendapatan dari 9 sektor pajak pada 2021 mencapai Rp 29,45 miliar. Target tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp 614,3 juta dibanding tahun 2020 dengan target Rp 28,83 miliar.

Kepala Bapenda Pesawaran, Wildan didampingi Kabid Pajak Daerah dan Lainnya Syarif Husin mengatakan, pada 2020 lalu capaian realisasi pajak mencapai Rp 29,13 miliar atau 101,03 persen dari target yang ditetapkan.

“Ada sejumlah faktor yang kita pertimbangkan mengapa ada kenaikan target di tahun 2021 ini. Diantaranya keyakinan perekonomian di tahun ini sudah mulai membaik, adanya wajib pajak baru, dan faktor lainnya tanpa harus mening-

katkan tarif pajak,” ungkap Syarif Husin, Rabu (20/1).

Selain itu, faktor lainnya data potensi pajak yang dianalisis melalui ekstensifikasi dan intensifikasi. Dimana, kondisi new normal dan adanya kepastian vaksin terhadap covid-19 diyakini geliat ekonomi akan berangsur pulih.

“Termasuk melihat realisasi pada tahun sebelumnya dalam menetapkan target pendapatan dari sektor pajak ini,” ucapnya.

Dijelaskan, 9 sektor pajak yang menjadi penopang pendapatan daerah yakni pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, PPI, PBB P2, BPHTB, pajak parkir, serta pajak air tanah dan mineral.

“Dan insya Allah kita dapat mencapai target tersebut,” pungkasnya. **(esn)**

Kuota Pupuk SUBSIDI Lampung Turun

ALOKASI pupuk subsidi pemberian pemerintah pusat ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung tahun 2021 mengalami penurunan sebanyak 185,166 ton.

Dimana alokasi pupuk subsidi tahun 2020 lalu sebanyak 728,873 ton, dan tahun ini sebanyak 543,707 ton. Itu diungkapkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Kusnardi.

Menurutnya, penurunan alokasi pupuk subsidi tahun ini karena adanya pandemi Covid-19, membuat semua daerah mengalami penurunan.

Namun, meski turun Lampung menjadi daerah nomor empat mendapat kuota terbanyak.

Untuk jumlah alokasi pupuk subsidi di daerah, seperti Kabupaten Lampung Selatan mendapatkan alokasi 68,101 ton, Lampung Tengah 115,326 ton, Lampung Utara 49,390 ton, Lampung Barat 31,606 ton, Tulang Bawang 26,140 ton, Tanggamus 33,985 ton.

Lalu, Kabupaten Lampung Timur 104,721 ton, Way Kanan 30,172 ton, Pesawaran 21,569 ton, Pringsewu 15,292 ton, Mesuji 17,896 ton, Tulangbawang Barat 16,710 ton, Pesisir Barat

10,136 ton, Kota Metro 2,282 ton, dan Bandar Lampung sebanyak 380 ton. «Pendistribusian pupuk subsidi kepada para petani sudah mulai sejak awal bulan lalu berdasar rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau E-RDKK yang diajukan oleh masing-masing Kabupaten/Kota,» ujarnya.

Untuk tahun ini pula menurut Kusnardi, tahun ini Kementerian Pertanian juga menaikkan harga eceran tertinggi (HET) untuk pupuk subsidi. Dimana tercatat pupuk urea naik Rp450, harga lama Rp180 ribu per kg dan harga baru

menjadi Rp2.250.

Kemudian pupuk ZA naik Rp300, dari Rp1.400 menjadi Rp1.700, harga SP-36 naik Rp400 dari sebelumnya Rp2.000 dan sekarang menjadi Rp2.400. Sementara pupuk NPK tetap Rp2.300 dari tahun sebelumnya. Sedangkan pupuk organik naik Rp300, dari sebelumnya Rp500 menjadi Rp800. «Kenaikan harga pupuk biasanya dibarengi dengan kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah. Dalam menyikapi ini Pemprov telah menyiapkan KUR dengan biaya murah untuk petani,» ucapnya. (rnn)

PELANGGAR. .

polisional hingga denda dan kurungan pidana.

“Jadi kalau adik-adik ini tidak memakai masker mohon maaf nanti saya tilang. Kemudian untuk penanggungjawab kegiatan/usaha akan dikenakan sanksi teguran, pembubaran, pencabutan izin hingga denda maksimal Rp5 juta termasuk ancaman penjara maksimal satu bulan (Denda Rp15 juta).

Menurut Qodratul, penindakan akan dilakukan dalam dua pekan yang berkerjasama dengan penegak hukum yakni TNI/Polri, Polda Lampung dan Satpol-PP. Kemudian diakhir penindakan akan dievaluasi bersama Dinas Kesehatan Lampung.

“Jadi selama dua Minggu kita laksanakan dulu kemudian setelah itu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung akan menilai semoga saja ada penurunan. Kalau ada penurunan kita tindaklanjuti lagi. Kita berharap dengan himbauan dan kesadaran bersama maka ini akan berakhir,” tutupnya.

Sementara dalam rilisnya, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung mengingatkan pemerintah daerah terutama Pemerintah Provinsi Lampung melalui Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Lampung agar meningkatkan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan (Prokes).

Pengawasan itu ditengah-tengah masyarakat terutama ditempat-tempat pelayanan publik yang berpotensi menimbulkan kerumumunan

seperti di Pelabuhan dan Stasiun Kereta Api sebagai pintu utama arus keluar masuk orang baik dari luar Lampung maupun yang hendak keluar Provinsi Lampung.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung, Nur Rakhman Yusuf mengatakan, Provinsi Lampung adalah salah satu daerah yang dekat dengan Pulau Jawa yang menjadi “episentrum” penyebaran Covid-19 memiliki potensi yang cukup tinggi terhadap penularan covid-19, maka dari itu perlu adanya pengawasan ekstra terhadap penerapan Proses terutama pada pelaku perjalanan baik perjalanan udara, laut maupun darat.

Menurut Nur Rakhman, dengan adanya Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 01 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), pemerintah daerah mestinya merespon dengan cepat hal-hal apa saja yang mesti dilakukan.

“Kepala Daerah merupakan pejabat yang paling bertanggungjawab dalam melindungi kesehatan masyarakat di daerahnya dari pandemi COVID-19 dan/atau faktor risiko tertular. Tentu sangat dibutuhkan tindakan-tindakan pencegahannya agar penyebaran virus di Provinsi Lampung dapat ditekan” ujarnya.

Nur Rakhman menjelaskan, dalam Surat Edaran Satgas tersebut, disebutkan bahwa setiap pelaku perjalanan laut

DARI HALAMAN 1

341 CPNS. .

masyarakat dengan baik.

Hal itu disampaikan orang nomor satu di Kota Tapis Berseri ini dalam sambutannya di acara penyerahan petikan Keputusan Walikota Bandar Lampung tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari pelamar umum formasi tahun 2019 di Aula Gedung Semergou, kantor pemkot setempat, Rabu

(20/1). “Saya minta kepada PNS yang baru menerima SK ini untuk bekerja dengan baik sesuai peraturan undang-undang yang ada,” ujarnya.

Herman HN juga meminta, agar PNS dapat melayani masyarakat dengan baik. “Selain harus bekerja sesuai undang-undang, disiplin dan rajin. Kita juga harus melayani rakyat

dengan baik, agar rakyat senang, karena kita adalah pelayan rakyat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandar Lampung, Wakhidi mengatakan, total ada 341 yang menerima SK CPNS tersebut, diantara tenaga guru 231 orang dan tenaga kesehatan 110 orang. “Tenaga guru berjumlah 213

DARI HALAMAN 1

PENAMBANGAN. .

dan bersama pihak tambang pernah membuat kesepakatan untuk perbaikan lingkungan.

Sementara itu, salah seorang pengelola penambangan Bukit Campang Raya Haji Toha yang sempat dihubungi, dia mengklaim bahwa selama ini pihaknya sudah mengikuti apa yang warga mau. Sehingga, dirinya merasa berita yang beredar luas kita tidak merespons warga tidaklah benar.

“Saya malah memberikan perhatian ke warga berupa uang untuk dampak lingkungan memang tidak terlalu besar. Namun itu itikad baik saya sebagai pengelola tambang galian C. Sebenarnya warga mana yang keberatan. Tidak ada warga yang merasa keberatan. Saya sendiri sudah menjalankan apa yang ada di kesepakatan dalam rapat waktu itu di aula SMPN 31,” katanya, kemarin (20/1).

Saat ditanyakan bentuk kontribusi yang diberikan, Haji Toha enggan menjawabnya. Haji Toha juga enggan dimintai keterangan lebih lanjut. Dirinya mengakui, penambangan ini tidak mempunyai kantor. Kemudian, terkait persoalan ini, Lampung Newspaper berusaha mengonfirmasi ke Dinas ESDM Provinsi Lampung. Salah satu pegawai menyebutkan kalau penambangan di Bukit Campangraya tidak jelas izin, karena kewenangannya pusat.

“Sejak 20 Desember 2020, izin ditangani oleh pusat dengan keluarnya undang-undang nomor 3 tahun 2020

tentang Minerba, jadi kami tidak bisa memberikan keterangan,” ujarnya.

Menanggapi penambangan galian C di Bukit Campangraya, anggota DPRD Provinsi Lampung dari Komisi II Wahru Fauzi mengatakan harus dipastikan apakah galian C itu punya izin atau tidak. Karena jika tidak berizin ada dugaan tindak pidana.

“Sejak Desember 2020 izin galian C itu menjadi kewenangan pusat tapi ada batasan tertentu Pemprov dan Pemkot harus mengetahui, seperti misalnya rekomendasi izin lokasi ini bisa ditracking apakah sudah sesuai dengan tata ruang dan Amdal. Kita harus memastikan apakah galian C itu punya izin atau tidak. Jika tidak punya izin berarti ada dugaan tindak pidana penerangan tanpa izin,” ringkas politisi Partai Nasdem ini.

Sebelumnya diberitakan, warga menuntut rusak parah akibat mobilitas angkutan bahan galian C Bukit Campangraya dengan truk Colt Diesel, yang melintasi Jalan Alimuddin Umar, Campangraya, Sukabumi rupanya hingga saat ini belum juga dipenuhi. Warga, justru menilai pihak pengembang abai terhadap tuntutan yang pernah disampaikan, sejak November 2020 lalu dalam Rembuk Pekon.

Diungkapkan, salah satu warga setempat yang identitasnya dirahasiakan, pihaknya mengeluh adanya kerusakan jalan sejak beroperasinya tiga lokasi galian C di wilayahnya

tersebut. Dia mengatakan tiga pengelola galian C dikelola secara perorangan yang beroperasi sejak 2018 lalu. “Jalan pada rusak parah, karena dilalui kendaraan besar jenis truk Colt Diesel yang membawa muatan Galian C berupa batu bukit. Selain itu, debu kemana-mana,” katanya saat ditemui di rumahnya, kemarin (19/1).

Sebelumnya, perwakilan pernah dilakukan Rembuk Pekon bersama warga dengan perwakilan galian C yang disaksikan lurah, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan para tokoh: masyarakat, pemda, agama. “Kami warga sini sudah ada kesepakatan dengan pihak pengelola agar mau mematuhi lima poin rembuk pekon,” ujarnya.

Diketahui, rembuk pekon dilaksanakan pukul 14.00 WIB di Gedung Aula SMPN 21 Bandar Lampung, Jumat, 4 November 2020 disaksikan juga perwakilan dari Polsek Sukarame dan Lantas Polresta Bandar Lampung itu menghasilkan lima poin kesepakatan, yakni: pihak pengusaha akan menyiram jalan sepanjang Jalan Alimudin Umar minimal dua kali seminggu, pihak pengusaha tidak akan melayani truk yang tidak dilengkapi terpal, pengurangan muatan, penimbunan jalan yang berlubang dengan sables, dan mobil truk wajib menambah dinding dibakinya guna mencegah muatannya bertaburan.

Akan tetapi, dalam perkembangannya setelah rembuk pekon sudah berjalan, hingga hari tidak ada realisasinya

seolah-olah pihak pengelola galian C mengabaikan hasil dari pertemuan dengan warga dan tokoh masyarakat. “Padahal kita warga hanya meminta pengelola galian C, agar melaksanakan poin tuntutan itu untuk kenyamanan warga Campangraya khusus disekitar galian C,” ucapnya.

Sementara, Sekertaris Lurah Campangraya M. Yusuf membenarkan tidak adanya realisasi atas tuntutan warga itu, meski sudah terjalin pertemuan dengan kesepakatan. Dengan tidak adanya respon dari pemilik galian C pihak kelurahan juga melakukannya beberapa cara untuk mengatasi permasalahan tersebut.

“Untuk menghilangkan debu dan jalanan yang licin pak lurah pernah meminta bantuan BPBD untuk melakukan penyiraman disebagian jalan tersebut,” terangnya.

Ia menyangkan, dalam rembuk pekon yang sudah di laksanakan hanya ada perjanjian namun tidak ada sanksinya bilamana pihak galian C tidak melaksanakan point-point rembuk pekon tersebut.

“Tidak ada sanksi yang harus diberikan jika pihak galian C tidak melaksanakan point yang sudah ditentukan. Kalau masalah izin, untuk izin lingkungan kemarin mereka sempat mau mengurus, tapi karena PBB tidak dibayar sehingga tidak ada tindak lanjut dari pak lurah sampai sekarang mereka juga gak nongol lagi,” tandasnya. (har/apr)

DARI HALAMAN 1

BANDARLAMPUNG. .

Project ini, katanya merupakan project Uni Eropa yang ditempatkan di Kota Bandar Lampung. “Kita mendapatkan project ini tidak mudah, yaitu dengan mengikuti audisi. Sehingga kita harus dapat manfaat dari project ini untuk kepentingan masyarakat,” katanya, usai memimpin rapat dengan Tim POKJA Kota Bandar Lampung dan CRIC di ruang rapat kantor Inspektorat setempat, kemarin (20/1).

Project ini dapat meminimalisir kerugian Pemkot Bandar Lampung akibat terjadinya perubahan iklim. “Manfaatnya, lebih waspada terhadap terjadinya perubahan iklim. Misalnya nelayan, bisa diberi tahu jika ada perubahan iklim. Dengan peringatan dini ini diharapkan dapat meminimalisir kerugian dan masih banyak lagi. Makanya kita perlu dukungan tim dalam me-

laksanakan rencana kerja ini. Dan komitmen untuk menyuskeskan project ini, demi kemajuan Kota Bandar Lampung,” harapnya.

Project Coordinator CRIC Putra Dwitama mengatakan project ini merupakan hasil bermitra dengan Eropa dan Asia, terkait perubahan iklim, polusi udara, sanitasi, pengelolaan sampah, dan lainnya. “Untuk Kota Bandar Lampung memilih tentang adaptasi terhadap perubahan iklim. Sehingga dapat mengantisipasi bencana yang terjadi akan akibat perubahan iklim,” katanya.

“Target kita, yaitu memastikan pembangunan di Kota Bandar Lampung yang ramah dengan semua lapisan masyarakat. Untuk di Pulau Sumatera ini, yang mendapatkan project ini, adalah Kota Pangkal Pinang, Pekanbaru dan Ban-

DARI HALAMAN 1

dar Lampung,” tambahnya.

Putra menjelaskan, POKJA dan beberapa pihak terkait dengan project ini akan melakukan pelatihan tentang adaptasi perubahan iklim dan penentuan risiko dengan terjadinya perubahan iklim. “Ada 12 tema untuk pelatihan nanti, diantaranya isu strategis, perubahan iklim, emisi GRK (gas rumah kaca), dan lainnya,” paparnya.

Putra mengungkapkan, anggaran yang disediakan merupakan suport dari project Uni Eropa untuk yang skala besar, yaitu sebanyak 3,2 juta uero untuk 10 kota di Indonesia. “Tahun ini kita akan melakukan pengembangan perangkat, dan tahun 2022 baru pelaksanaan. Untuk Bandar Lampung sendiri tidak disebutkan secara spesifik berapa besaran nilai anggarannya,” tandasnya. (dka/apr)

LAMPUNG NEWSPAPER

lebih Dinamis, lebih Lampung

GENERAL MANAGER : Ahmad Syarif
PEMIMPIN REDAKSI : Aprohan Saputra

Dewan Redaksi : Syarif, Aprohan, Rudi Andrianto, Khairul, Riedho Pratama, Edi Setiawan, Mustakim, Edy Susanto, Veridial Aryatama, KMS M. Yogi S., Zepta, Arka, Hanibal Batman, Rio Aldipo

Redaktur Pelaksana : Riedho Pratama
Redaktur : Edy Susanto, Rio, Zepta, Arka, Yogi

Reporter Bandar Lampung : Deka Agustina Ramlan, Riedho, Sandy Fernando

Reporter Daerah

Lampung Selatan : Muslim, Ferdi
Lampung Barat : Ade Irawan
Lampung Utara : Sabirin (non aktif)
Lampung Tengah : Aswin Siregar
Lampung Timur : Achmad Azzohirri ZA
Mesuji : Andri Gunawan
Metro : Riswan Saputra
Pesawaran : Andi Fauzi
Pringsewu : Mulyono
Tanggamus : Darwin Bamuda
Tulangbawang : Rahmad Sanico
Tulangbawang Barat : Saharuddin Nur

DIREKTUR UTAMA : H. Ardiansyah
DIREKTUR : H. Taswin Hasbullah
DIREKTUR OPERASIONAL : H. Senen

KOMISARIS UTAMA : Dwi Nurmawan
KOMISARIS : Suparno Wonokromo

PEMIMPIN PERUSAHAAN NON MEDIA : Muslim Pranata

Manager Keuangan : Sukriah
Tim Iklan : Taswin Hasbullah, Khairul, Rudi, Syarif, Senen
Kabiro Iklan Jakarta : Hari Andreas Ajahar
Pemasaran : Sandy Fernando, Riedho, Mustakim, Edi Setiawan, Joko, Heri Saputra, Azizchan Satib

DEWAN PENGAWAS

Ketua : Taswin Hasbullah
Wakil Ketua Dewan Pengawas : Edi Setiawan
Pemimpin Umum : Khairul
Wakil Pemimpin Umum : Rudi Andrianto

Anggota : Senen, Edi Setiawan, Mustakim

OMBUDSMAN : Irwan nasution, Thomas Azis Riska, Heri Wardoyo

Penanggung Jawab Media : H. Senen
Website : lampungnewspaper.com
Email : lampung_newspaper@yahoo.co.id
Alamat Kantor : Perumahan Bukit Kemiling Permai (BKP) Blok Q-11, Kemiling, Bandar Lampung, HP 0821-3620-4136

Pracetak : Talen Gentur H., Ledy Damai
Percetakan : PT Lampung Intermedia
Penerbit : PT Lampung Media Pers
Alamat Percetakan : Jl. Sultan Agung No. 17, Sepangjaya, Labuhanratu, Bandar Lampung, Telp.

(0721) 789751

Pencetak : H. Budi Susantiono (General Manager), Suparman, Zainal Arifin, Pujiyanto, Jenianto, Alim A., Joko

Dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan Lampung Newspaper selalu dibekali kartu pers atau surat tugas dari redaksi. Wartawan dilarang meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apa pun dengan alasan apa pun kepada narasumber. Jika menemukan bentuk pelanggaran ini harap laporkan pada Pemred ke kontak 082136204136.

ISI DILUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN



Baharen Rajin Serap Aspirasi Rakyat

KOTAAGUNG - Menyandang titel sebagai wakil rakyat, Baharen terus bergerak menyerap aspirasi masyarakat terutama di daerah pemilihannya (dapil). Sebagai Anggota DPRD Tanggamus, berbagai usulan diserap dan ditampung lalu disuarakan di parlemen. Salah satu cara yang dilakukan fraksi asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini dengan intens turun lapangan menyapa dan menjemput

berbagai usulan di dapilnya, baik saat masa reses atau memanfaatkan waktu kosong.

"Selama ini menyerap aspirasi masyarakat tidak hanya pada saat reses, tapi turun langsung," katanya.

Pria kelahiran 10 Juli 1971 itu melanjutkan, di sana, sejumlah usul dan saran dari warga setempat berhasil diserap. Beberapa di antaranya yakni pengadaan bantuan nelayan dan pertanian, pemba-

ngunan jalan serta penanganan tanggul banding yang selama ini menjadi momok masyarakat.

"Ya usulan masyarakat itu masih dalam seputaran jalan, alat-alat pertanian, kelautan serta normalisasi tanggul," ungkapnya.

Mantan Kepala Pekon Banding, Kecamatan Bandar Negeri Semuong dua priode berturut-turut ini mengaku, setiap aspirasi tersebut akan ditampung untuk

kemudian disuarakan di dewan. Untuk mengantisipasi terjadinya tumpang tindih program, kata dia, maka perlu disinkronkan lagi antara usulan masyarakat dengan program dari pemerintah Pekon setempat.

"Terkadang masyarakat tidak paham mana tanggungjawab kabupaten atau pekan. Semua mereka usulkan, nah tugas kita menindaklanjutinya agar tidak terjadi

timpang tindih," jelasnya.

Selain itu, Baharen menyarankan kepada pemerintah pekan setempat, agar usulan masyarakat tersebut didukung dengan data yang riil. Hal ini penting, agar ke depan bisa menghasilkan program yang tepat sasaran. Usul bantuan jaring untuk nelayan misalnya, tentunya perlu disertakan dengan ukuran jaring yang dibutuhkan. Sehingga, ketika disalurkan nanti bisa dimanfaatkan

dengan baik.

"Saya selalu menegaskan setiap usulan datanya harus riil. Supaya kami kalau ditanya di DPRD nantinya sudah tau," terangnya.

Baharen menuturkan bahwa pihaknya menyambut baik usulan yang disampaikan di forum itu. Selain menegaskan bakal menyuarkan aspirasi di dewan, dia juga meminta dukungan penuh dari masyarakat setempat. (adv)

